KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK BALITA DAN ANAK
2020

PERDAKOTASERANG NO. 3, LD 2020/NO. 3 TLD NO. 108, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK
BALITA DAN ANAK

- ABSTRAK
- Untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama, ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu, sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan jumlah kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak. di wilayah Kota Serang diperlukan penanganan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita Dan Anak
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 35 tahun 2014; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No.33 tahun 2012; PP No. 61 tahun 2014; Permenkes No.25 tahun 2014; Permenkes No.97 tahun 2014; Permenkes No.43 tahun 2016.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak dimaksud untuk terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan KIBBLA di Daerah, tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumber daya KIBBLA secara komprehensif, efektif dan efisien, tercapainya target penurunan jumlah kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan yang baik selama kehamilan, mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten, mendapatkan pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan/nifas, setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan. Setiap calon pengantin dan pasangan usia subur diberikan kartu ibu dan anak, yang meliputi informasi pranikah dan informasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam pernikahan termasuk peran laki-laki dalam kesehatan. Setiap pasangan usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pada masa kehamilan, Pelayanan kesehatan masa hamil, wajib dilakukan melalui pelayanan *antenatal* terpadu. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah dan swasta mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai. Apabila dalam pelayanan kesehatan masa kehamilan, terdapat komplikasi pada masa kehamilan diberikan pelayanan *adekuat*. Dalam pelayanan kesehatan persalinan, ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak milik pemerintah daerah atau swasta harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan KIBBLA yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya. Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak harus segera memberikan pelayanan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak yang standar, merata, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak. Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak pada fasilitas Kesehatan rujukan Pemerintah. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak harus mempunyai kompetensi, Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak. Peran serta masyarakat secara aktif dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok, Wali Kota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta, Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas. Pendanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Oktober 2020
- Penjelasan 5 HLM